

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Beni Ahmad Saebeni, 2006, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ham Wijaya, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suwardjoko, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.
- Kurniawan Tri Wibowo, 2004, *Hukum Lalu Lintas*, Citra, Bandung.
- S Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, 2002, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madanis Perss, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erns Utrech, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar, Jakarta.
- Yohanes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustia, Yogyakarta.
- S.F.Marbun dkk, 2004, *Dimensi Hukum Administrasi Negara*, Uli Perss, Yogyakarta.
- Masry Marigan, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia, Jakarta.
- Husnaini Usman, 2008, *Manajemen Teori Praktek dan Riset*, Bumi Aksara, Jakarta.
- I.G Wursanto, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Kanasius, Yogyakarta.

Baihaqi, 2016, *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya Dengan Disiplin Pengawasan*, Libria, Jakarta.

Ridwan, *Pelaksanaan Pemeliharaan Traffic Light di Kota Aceh*, UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mira Buana, Yogyakarta.

Fahmi Irfan, 2012, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, Jakarta.

## **Jurnal**

Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 7 No. 6. Hal 462-470.

Noto Royan. "Analisa Perencanaan Traffic Light Di Persimpangan Bandara SMB II Palembang". Pandecta. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang . Vol.5.No.2. September 2015

Ridwan. "Pelaksanaan Pemeliharaan Traffic Light di Kota Aceh". LIBRIA. UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Vol. 8. Nomor 2 Mei 2016.

Lili Anggraini. "Analisis Pengaruh Kinerja Lalu-Lintas Terhadap Pemasangan Traffic Light Pada Simpang Tiga". Jurna Ilmiah. Fakultas Teknik. Universitas Malikussaleh. Vol.6.No.2. September 2015

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan.

## Situs Internet

<https://news.detik.com/berita/d-3782411/traffic-light-di-makassar-error-pengendara-bingung-dan-lalin-macet/> diakses pada Tanggal 10 Februari 2022, Pukul 23.15 WITA

<https://perak-news.com/2018/09/06/lampu-lalu-lintas-tak-berfungsi-sejumlah-ruas-jalan-di-makassar-macet/> diakses pada Tanggal 10 Februari 2022, Pukul 23.25 WITA

<https://makassar.tribunnews.com/2019/01/13/traffic-light-di-pertigaan-jl-andalas-jl-diponegoro-makassar-tidak-berfungsi/> diakses pada Tanggal 10 Februari 2022, Pukul 00.12 WITA

<https://infosusel.com/2020/11/legislator-golkar-penyebab-macet-karena-pengaturan-waktu-traffic-ligth-yang-tidak-tepat/html/> diakses pada Tanggal 11 Februari 2022, Pukul 01.15 WITA

<https://makassar.tribunnews.com/2014/10/21/traffic-light-tak-berfungsi-lalu-lintas-di-jl-cendrawasih-makassar-kacau/> diakses pada Tanggal 11 Februari 2022, Pukul 01.30 WITA

Drs. M. Sofyan, SH., *Artikel Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum*, <http://www.kantorhukum-lhs.com/> diakses pada Tanggal 12 Februari 2022, Pukul 08.29 WITA

# LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 1347/S.01/PTSP/2022 Kepada Yth.  
Lampiran : - Walikota Makassar  
Perihal : Izin penelitian

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Unhas Makassar Nomor : 3776/UN4.5.3/PT.00/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NURUL FAIKAH HUSADI  
Nomor Pokok : B021181334  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DALAM PENGATURAN DAN KELAYAKAN TRAFFIC LIGHT OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Mei s/d 20 Juni 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 20 Mei 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Hukum Unhas Makassar di Makassar;  
2. *Peringgal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 23 Mei 2022

K e p a d a

Yth. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA MAKASSAR

Di -  
MAKASSAR

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
Nomor : 070/ 1036 -II/BKBP/I/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 1347/S.01/PTSP/2022 Tanggal 20 Mei 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : NURUL FAIKAH HUSADI  
NIM / Jurusan : R011B021181334181340 / Hukum Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS  
Tanggal pelaksanaan: 23 Mei s/d 20 Juni 2022  
Jenis Penelitian : Skripsi  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar  
Judul : "TINJAUAN HUKUM TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DALAM PENGATURAN DAN KELAYAKAN TRAFFIC LIGHT OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email [Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com](mailto:Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com).

a.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANGPOL.  
u.b.  
SEKERTARIS,

**DR. HARI, S.I.P., S.H., M.H., M.Si**

Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b  
NIP : 19730607 199311 1 001

**Tembusan :**

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);